



Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia is licensed under
A Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

STUDI HISTORIS TENTANG DAMPAK SOSIAL KONFLIK KOMUNAL DI KOTA SAMBAS PADA TAHUN 1999 TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT ETNIS MADURA

Yastrid Salwa Wardina¹⁾, Andang Firmansyah²⁾, Astrini Eka Putri³⁾

¹⁾ Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
E-mail: F1231211018@student.untan.ac.id

²⁾ Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
E-mail: andang.firmansyah@fkip.untan.ac.id

³⁾ Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
E-mail: astriniekap@fkip.untan.ac.id

Abstract. This research examines the social impact experienced by the Madurese community during the communal conflict in Sambas in 1999, focusing on the origins of the conflict, the evacuation process, relocation, dan the life of the Madurese community post-displacement. This research aims to examine the widespread impact of a communal conflict so that it can affect the conditions of the ethnic groups involved in it. This research uses the historical writing method with stages of topic selection, source collection, source criticism, interpretation, dan historiography. The results of this study indicate that the stigmatization of an ethnic group can ignite prolonged conflicts and attacks. Although this communal conflict highlights the violence between the Malay and Madurese ethnic groups. However, there is intervention from the Dayak ethnic group who are on the side of the Malay ethnic groups. The efforts taken by the government and security forces have not been sufficient to stop the conflict from spreading to areas with low conflict intensity, such as the city of Sambas. As a result, there was a wave exodus of the Madurese ethnic group to the Pontianak area as a temporary refuge. This conflict also involved security forces who were specifically brought in from other regions due to the difficult conditions to handle. The conflict that occurred also forced the property and land belonging to the Madurese ethnic group to be sold at very low prices. The Madurese ethnic group also faced with various choices and start a new life by trying different jobs.

Keywords: Sambas, Communal Conflict, Madurese, Malay, Dayak

Pendahuluan

Kota Sambas merupakan Ibukota Kabupaten Sambas yang terletak di kecamatan dengan nama yang sama, yaitu Kecamatan Sambas. Luas dari kecamatan ini berkisar 244,66 km² atau sekitar 3,86 persen dari luas wilayah Kabupaten Sambas (Shinta, 2024). Secara historis, wilayah Sambas telah ada sejak masuknya pengaruh Hindu-Buddha. Sambas kemudian berbentuk kesultanan di bawah kepemimpinan Raden Sulaiman sebagai sultan pertama Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Tsyafiuddin I (Arpan, 1995). Pada tahun 1839, pemerintah kolonial Belanda membentuk *Afdelingshoofdplant* di Pontianak, yang terbagi menjadi tiga wilayah

bagian, yaitu Zuid en Oostafdeeling van Borneo, Afdeeling Pontianak, dan Afdeeling Sambas (Touwe & Sopacua, 2023).

Struktur tata pemerintahan di Sambas kemudian berubah pada abad ke-20, di mana Sambas, menjadi bagian dari Afdeeling Singkawang dengan kedudukan sebagai *Onderafdeeling* Sambas (Suprpta et al., 2019). Pada tahun 1908 – 1942 di bawah pendudukan Pemerintah Kolonial Belanda, Sambas berstatus sebagai kewedanan (Arpan, 1995). Pembentukan Sambas sebagai kabupaten mulai terwujud di tahun 1963, dengan dihapuskannya sistem kewedanan yang mencakup daerah Singkawang, Bengkayang, Pemangkat, dan Sambas. Setelah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang disahkan, pusat pemerintahan Kabupaten Sambas dipindahkan dari Kota Singkawang ke Kota Sambas (Alfarizzi et al., 2025).

Melihat sejarah panjangnya wilayah Sambas ini, tidak lepas dari aspek kependudukan yang berpengaruh dalam perkembangan wilayahnya. Sejak zaman dahulu, masyarakat di Sambas memiliki latar belakang etnis dan bangsa yang beragam. Keragaman tersebut tercatat oleh P.J. Veth (2017) yang mengungkapkan bahwa, mendekati akhir abad ke-19 jumlah penduduk di Kota Sambas mencapai 10.000 jiwa yang terdiri dari orang Arab, Bugis, Tionghoa, dan Melayu. Hingga di tahun 1930, telah tercatat sebanyak 186.925 jiwa di Sambas yang berasal dari bangsa Eropa, Timur Asing, etnis Tionghoa, Melayu, Bugis, Madura, Jawa, Dayak, dan lain sebagainya (Rahmayani & Mirawati, 2015). Tidak sedikit masyarakat yang melakukan pernikahan silang antaretnis, seperti contohnya etnis Madura dan Melayu. Bahkan beberapa dari orang Madura juga fasih menggunakan bahasa dan dialek Melayu Sambas (Jonge & Nooteboom, 2006).

Meskipun keberagaman tersebut telah terbangun sejak lama, hubungan sosial yang terjalin tidak selamanya membuahkan aksi-reaksi yang harmonis, sebab dapat terjadi pertentangan di dalamnya (Fuadi, 2020). Adapun pertentangan ini, dapat berkembang menjadi sebuah konflik. Permasalahan antaretnis yang terjadi dapat digolongkan sebagai konflik yang bersifat horizontal dikarenakan kelompok yang terlibat berada pada posisi sosial yang setara.

Beberapa konflik horizontal yang pernah terjadi di Indonesia seperti; Tragedi Sampit pada tahun 2001, Kerusakan Poso, Peristiwa Mangkuk Merah, dan Kerusakan Sambas pada tahun 1999 yang menjadi topik dalam penelitian ini. Terjadinya kerusakan Sambas disebabkan oleh pertikaian antaretnis yang melibatkan etnis Melayu dan etnis Madura. Konflik berawal dari kejadian di Desa Parit Setia pada tanggal 17 Januari 1999 yang dikenal sebagai Tragedi Ketupat Berdarah (Bestari et al., 2022). Secara cepat, berita mengenai konflik tersebut menyebar ke daerah-daerah sekitarnya yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kota Sambas itu sendiri.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kajian sejarah yang didapatkan, ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan data dukung dalam penelitian ini, pertama, hasil penelitian dari Bayu Bestari, Amrazi Zakso, Haris Firmansyah (2022) dengan penelitian berjudul *Dampak Sosial bagi Masyarakat Pasca Kerusakan Antar Suku Madura-Melayu di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas pada Tahun 1999* yang membahas secara regional dampak kerusakan etnis Melayu dan Madura dalam segi Sosial-Psikologi, Sosial-Ekonomi, dan Sosial-Pendidikan di Kecamatan Pemangkat. *Kedua*, penelitian dari Bambang H. Suta Purwana (2002), yang berjudul *Kerusuhan Sosial di Sambas: Eksplorasi Akar Permasalahan dan Kebjiakan*

Penyelesaiannya yang membahas kerusakan di Sambas tahun 1999 menjelaskan secara regional di wilayah Sambas dari akar konflik, kebijakan relokasi, dan dampak sosial-ekonomi. *Ketiga*, penelitian dari Aliza Nova, Ika Rahmatika Chalimi, dan Edwin Mirzachaerulsyah yang berjudul *Dampak Tragedi Ketupat Berdarah bagi Masyarakat di Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas pada Tahun 1999 – 2004* yang membahas trauma pasca kerusakan, relokasi secara paksa, dan terhentinya kegiatan secara sementara seperti belajar mengajar.

Ketiga daerah pada penelitian terdahulu merupakan daerah yang terdapat di kawasan rawan konflik dan menjadi permulaan konflik tersebut meluas, sedangkan, daerah yang menjadi fokus penelitian dalam kajian ini, merupakan salah satu dari daerah yang memiliki tingkat ketegangan konflik dengan intensitas rendah. Namun, tetap terdampak dari kerusakan tersebut, sehingga masyarakat Madura yang ada di Kota Sambas secara terpaksa harus mengungsi. Penelitian ini juga menyajikan berbagai sudut pandang masyarakat ketika akhirnya konflik mulai merebak ke daerah Kota Sambas, baik pandangan masyarakat Madura maupun yang bukan. Dalam penelitian ini juga menyajikan perbedaan nasib yang dialami oleh informan, baik pada saat pengungsian maupun setelahnya dengan meneliti dampak sosial di dalamnya. Sehingga apa yang tertuang di dalam penelitian ini, dapat menjadi salah satu kepingan pelengkap penelitian terdahulu.

Untuk mengungkap dampak sosial yang dialami masyarakat, Peneliti merumuskan permasalahan utama yang akan dikaji, yaitu terkait bagaimana awal meluasnya kerusakan hingga ke Kota Sambas, bagaimana reaksi masyarakat Sambas terhadap kerusakan yang meluas, dan apa dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat Madura di Sambas. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dampak meluasnya kerusakan antaretnis dari segi sosial dengan fokus spasial di Kota Sambas.

Metode

Berkenaan dengan disajikannya kajian sejarah secara sinkronis dalam penelitian ini, maka penyusunan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sejarah atau metode historis. Metode menurut Kartodirdjo (dalam Sjamsuddin, 2012), didefinisikan sebagai “bagaimana orang memperoleh pengetahuan”. Dalam kaitannya dengan ilmu sejarah, metode dapat berarti bagaimana mengetahui sejarah. Metode Sejarah dapat diartikan sebagai proses memeriksa dan menganalisis secara kritis, sistematis, sekaligus terencana terkait catatan dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1969). Dengan adanya metode dalam penulisan sejarah, maka akan memudahkan untuk mengetahui sebab dan bagaimana peristiwa sejarah terjadi dengan memperhatikan pola dan bentuk yang terdapat pada tempat lain. Dalam metode penelitian sejarah terdapat tahap-tahap yang harus diikuti secara terstruktur tanpa melewatkan salah satu tahapan tersebut.

Adapun tahapan penulisan sejarah menurut Kuntowijoyo (2013), terdiri dari; pemilihan topik, heuristik, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi, dan historiografi sebagai bentuk akhir penulisan sejarah. Pemilihan topik penelitian didasari oleh kedekatan emosional dan intelektual peneliti. Heuristik yang melalui proses pencarian sumber, pengumpulan sumber, dan identifikasi sumber. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan literatur yang relevan dengan kajian yang dibahas. Untuk pencaharian data berbentuk tulisan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu dilakukan secara daring dengan memanfaatkan

situs-situs seperti Google Books, Google Scholar, Researchgate, dan JSTOR. Sedangkan dalam proses luring didapatkan melalui Perpustakaan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII.

Pengumpulan sumber dalam penelitian ini berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari hasil wawancara informan yang terdampak dari peristiwa kerusuhan. Teknik wawancara yang dipilih dalam penelitian ini adalah semi-terstruktur, yakni metode wawancara yang menggunakan panduan wawancara sebagai acuan, namun tidak mengikat peneliti untuk mengajukan pertanyaan secara baku. Sehingga peneliti dapat menambahkan variasi pertanyaan sesuai dengan situasi dan respons yang diberikan oleh informan. Dalam penelitian ini, setidaknya melibatkan 6 informan yang telah dipilih secara purposif berdasarkan keterikatan langsung dengan topik. Informan terdiri dari; dua orang dari komunitas Madura yang mengalami secara langsung peristiwa kerusuhan hingga proses relokasi, dua masyarakat Melayu yang berdagang di Pasar Sambas dan memiliki hubungan sosial dengan komunitas Madura, satu orang perempuan Melayu yang menikah dengan laki-laki dari etnis Madura, serta satu narasumber Melayu yang rumahnya berdekatan dengan perumahan masyarakat Madura. Sebagian besar berusia antara 47-70 tahun, sehingga pada peristiwa berlangsung, mereka sudah berada pada fase dewasa dan berperan sebagai kelompok pelaku sosial aktif, maka dari itu dinilai relevan untuk diwawancarai. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi distorsi ingatan seiring bertambahnya usia narasumber. Sebelum proses wawancara, peneliti terlebih dahulu meminta izin untuk melakukan perekaman suara selama kegiatan wawancara berlangsung. Data yang didapat dari para informan, kemudian dibentuk ke dalam sebuah transkrip. Sumber yang kedua ialah sumber sekunder, yang diperoleh dari jurnal, buku, dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila pencaharian sumber dirasa cukup, kemudian dilakukan tahap kritik eksternal dan internal terhadap sumber. Setelahnya, dilakukan analisis dan interpretasi, sehingga menciptakan lintasan kronologis peristiwa yang tertuang dalam penelitian ini

Hasil Penelitian

Awal Kedatangan Etnis Madura di Kalimantan Barat

Kedatangan etnis Madura di Kalimantan Barat memiliki berbagai latar belakang historis. Dalam penelitian Any Rahmayani & Ina Mirawati (2015) mencatat bahwa, kedatangan etnis Madura, dimulai sejak masa Hindia Belanda, ketika mereka direkrut sebagai tentara untuk menghadapi perlawanan Kongsi Tionghoa di Monterado pada tahun 1850. Migrasi ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup, dikarenakan di daerah mereka tidak memiliki apa-apa. Sedangkan, dalam penelitian Bambang H. Suta Purwana (2002) menduga bahwa migrasi telah dimulai sejak awal abad ke-18, ketika pasukan Kerajaan Mataram di bawah Sultan Agung datang untuk membantu Kesultanan Sambas memerangi Kerajaan Riau. Beberapa kemudian memilih untuk meneruskan garis keturunan di Sambas.

Achadiyat (dalam Arkanudin, 2006) mengemukakan bahwa, kehadiran etnis Madura di Kalimantan Barat mulai tampak pada akhir abad ke-XIX, namun baru menetap pada tahun 1920. Migrasi yang dilakukan oleh etnis Madura seringkali disebabkan oleh swakrsa. Terkait dengan migrasi swakarsa, Sudagung (dalam Yogaswara, 2012) berpendapat bahwa, terdapat tiga tahapan migrasi yang dilakukan

etnis Madura ke Kalimantan Barat, yang terdiri dari periode perintisan (1902-1942), periode surut (1942-1950), dan periode keberhasilan yang terjadi setelah tahun 1950.

Pada periode perintisan, diduga kedatangan etnis Madura diikuti dengan “perdagangan budak” yang terselubung. Adanya perdagangan garam, sapi, kamping, dan keterampilan orang Madura dalam menggunakan perahu layar, membuat migrasi orang Madura menjadi lancar. Dalam migrasi yang pertama, etnis Madura dipekerjakan sebagai buruh-buruh di perkebunan karet milik pemerintah, hal ini didukung dengan harga karet yang melonjak naik pada tahun 1920 (Rahmayani & Mirawati, 2015).

Pada periode surut, migrasi etnis Madura terjadi dikarenakan kehadiran Jepang dan revolusi kemerdekaan. Migrasi yang dilakukan juga dalam skala yang kecil. Sedangkan, pada periode keberhasilan, migrasi yang dilakukan berangsur-angsur meningkat. Hal ini dilatarbelakangi dengan terdapat kesempatan kerja tanpa memerlukan pendidikan dan hanya bermodalkan fisik yang tangguh (Husaini, 2015).

Semenjak adanya migrasi pada periode kemerdekaan, konflik yang melibatkan etnis Madura di Kalimantan Barat mulai marak terjadi. Alqadrie (dalam Arkanudin, 2006) menyebutkan, sejak tahun 1962 hingga pada tahun 1999 konflik komunal terjadi sebanyak 11 kali. Dalam kurun waktu tersebut, salah satu konflik pada tahun 1967 melibatkan komunitas Dayak dan komunitas Tionghoa. Pada tahun 1999, konflik tersebut berfokus pada perseteruan antara komunitas Madura dan komunitas Melayu. Selebihnya, konflik yang terjadi melibatkan komunitas Dayak dan komunitas Madura.

Akar Terjadinya Kerusuhan Antaretnis Tahun 1999 di Kabupaten Sambas

Melihat dari bagaimana migrasi pada periode keberhasilan dilatarbelakangi oleh motif swakarsa, secara tidak langsung hal ini juga menjadi faktor penyebab perselisihan antara etnis Melayu Sambas dan etnis Madura. Dalam penelitian Syarif Ibrahim Alqadrie (1999), mudarnya kesempatan kerja dan hak kepemilikan menjadi salah satu faktor terjadinya konflik komunal antara komunitas Melayu dan Madura. Di mana secara perlahan hak tersebut berpindah tangan dengan cara kekerasan dan intimidasi.

Menurut Eka Jaya Putra Utama (2017), terdapat persamaan jenis pekerjaan antara masyarakat Melayu Sambas dan masyarakat Madura, yaitu bekerja sebagai petani dan memilih tinggal di daerah pedesaan. Akibatnya, terdapat perebutan sumber daya ekonomi, terutama pada bidang tanah pertanian. Menurut Mohammad Ali Al Humaidy (2012), kejadian tidak semata-mata berasal dari faktor ekonomi, melainkan juga disebabkan oleh minimnya dialog antaretnis, rendahnya tingkat pendidikan, tidak optimalnya peran lembaga keagamaan maupun adat, serta lemahnya penegakan hukum. Dalam beberapa dekade, interaksi antara masyarakat Melayu dan Madura tidak berhasil membentuk basis akomodasi sosial yang kuat (Purwana, 2000).

Hal ini juga diperkeruh dengan pandangan masyarakat Melayu terhadap etnis Madura, yang dinilai sering mengelompokkan dirinya ke dalam eksklusivitas budaya, menggunakan kekerasan, bertindak kriminal, sering membawa senjata tajam saat bepergian, dan menggunakan pakaian serba hitam yang menimbulkan kesan menyeramkan. Meskipun demikian, tidak semua orang Madura yang memiliki sifat seperti itu, adapun dari mereka yang sangat terbuka dengan masyarakat lain dan mampu menempatkan diri dengan baik. Sedangkan dalam pandangan masyarakat Madura, etnis Melayu dinilai lemah, penakut, dan sebagainya.

Di dalam beberapa literatur, umumnya etnis Melayu dikenal sebagai pribadi yang memiliki sifat yang lembut dan mudah mengalah. Namun, sifat ini berbanding terbalik saat berhadapan dengan etnis Madura (Aminullah et al., 2015). Sifat orang Melayu yang tampak sabar dan tidak menyukai konflik terlihat dari bagaimana etnis Melayu tetap netral ketika terjadi konflik antara etnis Dayak dan Madura yang terjadi sebelum-sebelumnya (Alqadrie, 1999).

Konflik yang terjadi pada tahun 1999 berawal di daerah Kecamatan Jawai. Pada 17 Januari 1999, diduga terjadi aksi pencurian di Desa Parit Setia yang dilakukan oleh seorang etnis Madura bernama Hasan bin Niyam. Aksi tersebut dilakukan di rumah Amat bin Tajuin yang secara kebetulan berasal dari etnis Melayu. Hasan kemudian berhasil ditangkap dan berakhir dengan keadaan babak belur. Setelahnya, Hasan diantar oleh aparat keamanan di Jawai ke Puskesmas Matang Suri. Keesokan harinya, Hasan kembali ke rumahnya di Desa Sari Makmur untuk merayakan lebaran Idulfitri (Purwana, 2000).

Konflik kemudian berlanjut pada tanggal 19 Januari 1999, di mana datangnya rombongan etnis Madura dari Desa Rambayan sekitar 200 orang. Rombongan tersebut datang dengan membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan terhadap masyarakat Desa Parit Setia sedang melaksanakan solat Asar (Bestari et al., 2022). Adapun dalam penelitian Eka Jaya Putra Utama (2017) menyebutkan jumlah rombongan etnis Madura tersebut berkisar 300 orang. Jumlah korban yang meninggal dunia akibat serangan tersebut berjumlah 3 orang, yang terdiri dari 2 orang Melayu dan 1 orang Dayak mu'alaf. Setelah melakukan penyerangan tersebut, rombongan etnis Madura segera pergi meninggalkan Desa Parit Setia (Nova et al., 2023).

Saat awal merebaknya konflik, aparat keamanan hanya mengambil penanganan dengan mengevakuasi masyarakat Madura, tanpa mengambil tindakan untuk menghentikan penyerangan yang terus-menerus terjadi (Darmaji et al., 2024). Pada akhirnya gelombang eksodus masyarakat Madura dari daerah Kabupaten Sambas. Sebagian besar dari mereka kemudian direlokasikan di wilayah Kota Pontianak untuk sementara waktu hingga mendapat kejelasan untuk kehidupan setelahnya. Sedangkan beberapa di antaranya memilih untuk kembali ke Pulau Madura. Beberapa tempat yang digunakan sebagai tempat pengungsian yaitu Gor Pangsuma, Gor UNTAN, dan Asrama Haji Pontianak dan Barak Marhaban di wilayah Singkawang (Suprpto, 2018).

Sebagai perbandingan, berikut perbedaan jumlah penduduk dari tahun 1997-2005 sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel 1. berikut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk dari Tahun ke Tahun

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | | | |
|----|-----------|-----------------|--------|--------|--------|
| | | 1997 | 1998 | 1999 | 2005 |
| 1 | Sambas | 87.365 | 88.923 | 86.464 | 41.197 |
| 2 | Pemangkat | 93.099 | 94.769 | 86.652 | 59.758 |
| 3 | Jawai | 64.353 | 65.500 | 60.818 | 32.929 |

Diolah dari data: Hasil Registrasi Kabupaten Sambas; Kabupaten Sambas dalam Angka 1998; Kabupaten Sambas dalam Angka 1999

Pasca konflik yang terjadi, jumlah penduduk Kecamatan Sambas terlihat berkurang dibandingkan dengan populasi pada tahun sebelumnya. Berkurangnya populasi di Kecamatan Sambas dapat dikatakan rendah jika dibandingkan dengan wilayah Pemangkat dan Jawai. Menurut peneliti, hal ini disebabkan oleh eskalasi konflik yang terjadi tidak sebesar yang ada di dua wilayah tersebut. Di tahun 2005,

jumlah populasi penduduk berkurang lebih dari setengah dikarenakan adanya pemekaran wilayah kecamatan.

Hasil sensus penduduk pada tahun 2000 memperlihatkan populasi etnis Madura di Sambas terhitung hanya sekitar 0,007 persen atau sebanyak 75 jiwa dari total penduduk yang ada di Kabupaten Sambas (Tanasaldy, 2012). Sehingga tidak sepenuhnya masyarakat Madura mengikuti pengungsian dan relokasi, beberapa dari mereka memilih untuk tetap tinggal di Sambas. Melalui informasi yang diperoleh dari para informan, terdapat beberapa orang Madura yang disembunyikan keberadaannya pada saat kerusuhan dan hingga saat ini masih menetap di Sambas. Sebenarnya, di daerah Sambas sendiri, terutama di Kota Sambas, tidak memiliki intensitas kerusuhan yang parah seperti daerah Jawai, Tebas, dan Pemangkat. Namun, wilayah Kota Sambas secara tidak langsung juga terkena dampaknya meskipun jarang terjadi konflik besar antaretnis.

Sedari awal, konflik antara etnis Melayu dan etnis Madura, bukanlah mencakup keseluruhan etnis Madura yang ada di Kabupaten Sambas. Melainkan, hanya terbatas pada etnis Melayu Sambas dan etnis Madura pendatang. Yang membedakan antara etnis Madura pendatang baru dan lama adalah sifat pendatang lama lebih ramah, dapat berkomunikasi dengan baik, minim eksklusivitas, dan tidak memaksakan kehendak (Alqadrie, 1999). Untuk membedakannya dengan pendatang baru, pada umumnya etnis Madura lama disebut sebagai Madura Sambas.

Pembahasan

Kondisi Kerusuhan di Kota Sambas dan Reaksi Masyarakat Terhadapnya

Menjelang sepuluh hari sebelum Iduladha aparat keamanan meminta warga Madura untuk mengungsi di Kompi Sambas. Prioritas utama yang diungkapkan adalah lansia. Menurut keterangan Mustafa (Wawancara, 19 Mei 2025) pengungsian dijanjikan hanya berlangsung dua hingga tiga hari. Namun diperpanjang hingga Sebagian warga kembali ke rumah untuk mengambil lebih barang seperti beras dan alat memasak. Sementara itu, bagi para pengungsi yang memiliki hubungan keluarga dengan aparat keamanan, tidak perlu kembali ke rumah, dikarenakan peralatan yang diperlukan selama pengungsian telah dibantu dibawakan oleh aparat yang bersangkutan (Wawancara dengan Lija, 22 Mei 2025). Perbedaan yang dirasakan oleh kedua informan menunjukkan adanya bentuk eksklusi sosial, yang terlihat dari perlakuan terhadap pengungsi dibedakan berdasarkan kedekatan sosial dan akses terhadap kekuasaan, sehingga berpotensi membentuk hubungan hierarki antara warga yang terlindungi dan yang terpinggirkan.

Berdasarkan penuturan masyarakat, kerusuhan yang meluas hingga ke Kota Sambas, tidak semata-merta dilakukan oleh penduduk setempat, melainkan diprovokasi oleh massa yang berdatangan dari daerah luar yang memiliki intensitas konflik jauh lebih tinggi. Misalnya seperti wilayah Tebas dan Pemangkat (Wawancara dengan Achmad Yani, 25 Juni 2024). Menurut Abdul Ghofir (Wawancara, 25 Juni 2024), masyarakat Sambas dan masyarakat Madura memiliki hubungan yang baik, karena situasi yang damai tersebut, Sambas mendapat julukan banci dan sempat mendapat kiriman 'barang' bekas pembantaian dari daerah lain.

Semenjak adanya provokasi dari massa, kerusuhan juga tidak dapat dihindarkan. Mustafa (19 Mei 2025) menceritakan bagaimana salah seorang iparnya harus tewas secara mengenaskan dengan kepala yang terpenggal, kemudian diarak menggunakan bambu oleh massa ke Keraton Sambas. Hidung dari mayat tersebut

disumbat menggunakan rokok. Hingga saat ini, jenazah dari ipar Mustafa tidak pernah ditemukan. Diduga tubuhnya telah hancur dimakan mentah-mentah. Lebih lanjut, Mustafa juga menyebutkan bahwa banyak jenazah yang tidak dikuburkan dan tidak sedikit dari jenazah tersebut dalam keadaan hancur. Akibat dari peristiwa tersebut tentunya menimbulkan trauma mendalam. Tidak hanya menjadi trauma individu, tetapi sebagai trauma kolektif. Secara tidak langsung terdapat dua kelompok korban, yakni dari pihak Madura dan masyarakat Sambas. Dikatakan demikian karena melihat bagaimana tekanan dan provokasi yang diberikan oleh pihak luar untuk segera melakukan pengusiran terhadap masyarakat Madura. Terlebih, peristiwa ini juga terjadi secara mendadak.

Meskipun yang disoroti dalam konflik komunal tahun 1999 adalah masyarakat Melayu dan Madura. Perlu diketahui juga, masyarakat Dayak juga turut serta dalam konflik ini dengan jumlah yang sedikit. Seperti keterangan yang diberikan oleh informan, terdapat komunitas Dayak yang terlibat dalam penyerangan di Sambas. Menurut Atem (2022), dapat dikatakan konflik di Sambas merupakan konflik yang melibatkan etnis Melayu, Madura, dan Dayak. Namun, etnis Dayak di sini bukanlah penengah bagi pertentangan kedua etnis lainnya. Melainkan, memiliki keberpihakan terhadap etnis Melayu karena memiliki kepentingan yang sama untuk menentang etnis Madura.

Di dalam keterlibatannya, komunitas Dayak melakukan penyerangan dengan cara memenggal kepala lawan. Cara tersebut hampir mirip dengan pemenggalan kepala dalam tradisi mengayau. Dikatakan hampir mirip, karena yang melakukan pemenggalan kepala tidak hanya dari kalangan komunitas Dayak saja, melainkan juga dari kalangan komunitas Melayu. Secara historis menurut Susan Russel, pengayauan dilakukan dengan tujuan beragam, seperti ritual keagamaan, mitologi, kesuburan, pandangan kosmologis, dan status sosial. Dari sisi ritual keagamaan, kepala korban pengayauan dipandang sebagai simbol pemersatu antara jiwa korban dan para leluhur. Dipercaya bahwa jiwa korban tersebut akan menjadi sekutu spiritual. Bahkan, ritual ini diyakini dapat meningkatkan hasil panen.

Praktik mengayau ini juga sempat disinggung dalam penelitian Bambang H. Suta Purwana (2002), praktik mengayau dalam kekerasan massal, sebagai refleksi sosial dari kekerasan yang direkayasa ABRI ketika menumpas PGRS/Paraku, dengan melibatkan orang Dayak sebagai salah satu bentuk penumpasan. Sejatinya, tradisi mengayau sudah lama ditinggalkan oleh orang Dayak semenjak disepakatinya Perjanjian Tumbang Anoi. Menurut Parsudi Suparlan (dalam Ubaedillah, 2022), meskipun orang Melayu tidak meminum darah dari mangkok merah, secara emosional mereka tetap terpengaruh untuk melakukan tindak kekerasan seperti pemenggalan kepala. Hal ini dapat disebabkan oleh keluhan dan kebencian yang serupa terhadap etnis Madura, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk melakukan kekerasan seperti etnis Dayak. Hal tersebut juga menjadi sugesti masyarakat Melayu seperti sedang berada di bawah pengaruh spiritual leluhur. Pada akhirnya, solidaritas yang terbentuk antara masyarakat Melayu dan Dayak bukan berdasarkan kesetaraan, melainkan reproduksi diskursus “kami” dan “mereka”. Hingga menjadikannya sebuah eksklusivitas untuk meminggirkan etnis Madura secara berlapis.

Menurut Mustafa (Wawancara, 19 Mei 2025), saat kabar kerusuhan di kota lain mulai terdengar, masyarakat Madura di Sambas tidak menduga kejadian akan meluas hingga ke Kota Sambas. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari salah satu anak tetangga Mustafa yang bertugas sebagai seorang tentara di Mempawah. Tentara

tersebut mengatakan bahwa situasi aman dan dapat terkendali. Meski demikian, tentara itu sama sekali tidak mengetahui kondisi di Sambas. Sehingga kerusuhan terjadi, tidak terdapat kewaspadaan adanya potensi bahwa terjadinya eskalasi konflik di Sambas. Hal ini dapat disebabkan oleh masyarakat yang hanya memandang bagaimana hubungan antar-etnis yang ada di lingkungan mereka, tanpa meningkatkan kewaspadaan bahwa konflik bisa saja datang dari arah luar.

Begitu juga dengan pemerintah dan aparat keamanan, yang pada awalnya hanya mengambil langkah damai setiap terjadi konflik tanpa mengambil langkah tegas dengan cekatan. Hal ini juga secara tidak langsung, membuat aparat keamanan dan pemerintah di wilayah lain merasa konflik dapat terkendali. Sementara itu langkah yang diambil setelah konflik, menunjukkan tidak adanya penanganan terkait psikologis para korban, sehingga trauma kolektif tersebut tetap dipelihara. Pada akhirnya trauma kolektif ini memunculkan prasangka baru dan masing-masing saling menyalahkan dan meminta hak untuk didengar. Pada saat itulah, trauma tersebut berubah menjadi memori kolektif dan identitas kelompok tertentu (Pietra, 2016).

Melalui hasil wawancara bersama para informan, didapatkan beragam pandangan terkait kerusuhan yang ada di Kota Sambas. Beberapa informan bersaksi bahwa, sama seperti di wilayah lain, rumah masyarakat Madura banyak dibakar. Dari kesaksian Roesli (Wawancara, 26 Juni 2024) masyarakat Madura yang tinggal di Desa Pasar Melayu dan Desa Durian banyak dibakar. Ditambah dengan keterangan yang diberikan oleh Mustafa (Wawancara, 19 Mei 2025), saat sudah di tempat pengungsian, terdengar kabar bahwa selain membakar rumah orang Madura, massa juga menangkap hewan ternak seperti ayam dan sapi. Diceritakan juga, saat rekan ayah Mustafa mencoba membantu dengan membawa hasil panen keluarga Mustafa ke kompi sebagai bahan makanan. Namun, upaya tersebut tidak mudah, dikarenakan hasil panen tersebut juga direbut oleh massa. Dalam melakukan penelusuran, peneliti juga menemukan bukti gambar kerusakan yang bisa diakibatkan oleh konflik komunal yang tidak terkendali.

Dampak Sosial Konflik Komunal

Mendekati konflik, masyarakat Madura telah diimbau untuk tidak keluar rumah. Pada saat yang sama, secara bertahap masyarakat Madura dijemput oleh para aparat keamanan menggunakan bus untuk diarahkan menuju ke Kompi Sambas. Sementara itu, ketika massa mulai berdatangan, Sebagian dari masyarakat Sambas yang bukan berasal dari etnis Madura tidak berani untuk keluar rumah dikarenakan ketakutan akan situasi yang terjadi. Adapun dari mereka yang bahkan mengungsi ke kawasan Istana Sambas.

Agar konsistensi penulisan dapat terjaga serta sebagai upaya untuk menghindari pengulangan istilah, maka mulai dari bagian ini masyarakat Madura yang terdampak langsung oleh konflik akan disebut sebagai pengungsi dalam kajian ini. Sebagai salah satu pengungsi, Lija (Wawancara, 22 Mei 2025) mengungkapkan bahwa kehilangan pakaian ketika berada di kompi merupakan hal yang biasa terjadi. Selama mengungsi, aparat secara tegas memberikan instruksi kepada pengungsi agar tidak berlama-lama di Kompi Sambas dan segera bersiap jika truk yang mengevakuasi ke arah Pontianak sudah tiba. Karena jumlah truk pengangkut yang terbatas, pengungsi harus bergiliran naik ke dalam truk. Menurut keterangan Mustafa (19 Mei 2025), truk yang menjemput, dikawal oleh Pasukan Huru-Hara (PHH) yang didatangkan khusus dari Pulau Jawa.

Kondisi perjalanan di dalam truk menuju Pontianak tidak sepenuhnya berjalan lancar. Di sepanjang jalan Tebas – Pemangkat, para pengungsi mendapat sorakan dan lemparan dari massa. Meskipun saat itu terdapat pengawalan oleh PHH, keberadaan massa yang masih berkeliaran serta keberanian mereka untuk melakukan intimidasi terhadap rombongan pengungsi menandakan lemahnya kendali aparat terhadap kondisi di lapangan pada saat itu. Selama perjalanan, truk harus berhenti beberapa saat. Hal ini dikarenakan para petugas yang mengawal perlu beristirahat dan makan. Sedangkan, para pengungsi duduk di dalam truk secara berdesak-desakan dan berjemur di bawah panas matahari.

Di dalam kondisi yang telah berstatus sebagai pengungsi, tetap saja masyarakat Madura mendapatkan intimidasi yang bisa dilihat saat perjalanan menuju ke Pontianak. Perlakuan tersebut merupakan perwujudan dari eksklusi sosial yang dilegitimasi oleh struktur birokrasi krisis. Dalam analisis sosial, kondisi ini bisa dipahami sebagai proses *Othering*, yang berarti kelompok tertentu ditandai sebagai asing (*out group*) di lingkup sosial yang mereka bantu bangun selama bertahun-tahun. Gagasan mengenai *Othering* hadir karena adanya yang lain dalam masyarakat. *The Other* bukanlah seseorang yang sepenuhnya berada di luar diri “kita”, melainkan individu atau kelompok yang secara sengaja ditempatkan di luar tatanan sosial (AbdulMagied, 2002). Pengasingan masyarakat Madura dari Sambas juga dapat dilihat dari bagaimana rumah mereka dibakar dan ternak yang diambil paksa yang secara efektif menutup kemungkinan masyarakat Madura menetap kembali.

Agar dapat bertahan hidup, pemerintah memfasilitasi tempat pengungsian sementara. Tempat yang ditentukan saat itu adalah GOR Pangsuma, GOR UNTAN, dan Asrama Haji Pontianak (Suprpto, 2018). Dikarenakan para pengungsi menempati fasilitas publik tersebut, beberapa penyelenggaraan kegiatan olahraga yang sebelumnya terjadwal, menjadi terganggu (Purwana et al., 2004). Sedangkan, bagi para pengungsi yang memiliki keluarga di Pontianak, mereka langsung dijemput oleh keluarga masing-masing. Bagi mereka yang melakukan amalgamasi dengan etnis Madura, juga turut mengungsi. Salah satu contohnya adalah Maulina (Wawancara, 18 Desember 2024) yang menyatakan bahwa selama masa pengungsian dan relokasi di Pontianak, Maulina sempat putus kontak dengan keluarganya yang ada di Sambas selama dua tahun. Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan alat komunikasi serta tidak adanya kontak keluarga yang dapat dihubungi. Dikarenakan dalam keterangan yang diberikan, ibu dari Maulina harus bertanya kepada orang-orang yang tersisa di tempat pengungsian mengenai keberadaan Maulina dan keluarganya saat itu.

Kedatangan pengungsi tersebut dicap beban tersendiri bagi Pemerintah Kota Pontianak. Selain dinilai mengganggu jadwal olahraga, dalam penelitian Bambang H. Suta Purwana et al. (2004) juga melaporkan bahwa sering terjadi benturan antara pengungsi dan masyarakat, sampai-sampai hampir menimbulkan kerusuhan bernuansa SARA yang berpotensi meluas di Kota Pontianak. Namun, untungnya persoalan tersebut dapat meredup berkat kebijakan yang telah diambil untuk meredakan ketegangan sosial tersebut.

Pascakonflik tersebut, banyak harta dan juga tanah masyarakat Madura di Sambas kemudian dijual. Menurut keterangan Mustafa (Wawancara, 19 Mei 2025) karena tidak bisa membawa kendaraan dan ternak ke Pontianak, secara terpaksa dijual kepada aparat dengan harga yang murah. Contohnya ternak yang seharusnya mencapai harga jual Rp700.000, dibeli dengan harga kisaran Rp150.000 – 200.000.

Dalam keterangan yang diberikan Lija (Wawancara, 22 Mei 2025), apabila tetap memilih untuk membawa kendaraan ke Pontianak, maka dikenakan tarif sebesar Rp500.000 – 1.000.000 untuk dinaikkan ke dalam truk.

Meskipun pemerintah telah berupaya untuk melindungi tanah milik masyarakat Madura di Sambas dan bersedia menjadi mediator transaksi jual beli. Realitanya, sangat sulit bagi masyarakat Madura untuk melakukan transaksi dikarenakan tidak adanya sarana komunikasi bagi orang Madura dan Pemerintah Kabupaten Sambas. Beberapa tanah milik masyarakat Madura sempat didirikan bangunan illegal, sehingga ketika akan dijual, pemilik bangunan menuntut uang ganti rugi kepada pembeli. Akhirnya, Sebagian tanah diberikan kepada pemilik bangunan dan sisanya dijual dengan harga murah.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Madura untuk bertahan hidup merupakan dampak dari adanya kemiskinan struktural. Menurut Selo Soemardjan, yang dimaksudkan dengan kemiskinan struktural ialah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosialnya membuat masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Panjaitan, 2003). Meskipun pemerintah memberikan bantuan dana sebesar Rp500.000 kepada mereka, dana tersebut tidak sepenuhnya dapat menopang kehidupan. Banyak dari masyarakat Madura harus berjuang untuk mengumpulkan uang dari hasil penjualan aset dan mencoba berbagai pekerjaan di tempat baru, seperti berjualan tabloid di jalanan, menjadi kuli bangunan, tukang becak, dan berbagai pekerjaan kasar lainnya.

Simpulan

Keberadaan etnis Madura di Kalimantan Barat, khususnya daerah Sambas memiliki akar historis yang kompleks dan membentang dari masa kolonial hingga pasca-kemerdekaan. Sebagian besar etnis Madura yang menetap bertujuan memperbaiki taraf hidup yang lebih baik. Migrasi yang dilakukan juga bersifat swaskarsa. Konflik komunal yang terjadi pada tahun 1999 di Sambas menjadi salah satu peristiwa yang kompleks hingga terjadinya gelombang eksodus besar-besaran dari etnis Madura. Sejak awal, konflik yang melibatkan etnis Melayu dan etnis Madura, bukanlah mencakup keseluruhan etnis Madura di Sambas, melainkan hanya terbatas pada etnis Madura pendatang. Dari hasil penelitian didapati pandangan bahwa etnis Madura yang telah lama menetap, lebih mudah beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat Sambas. Sehingga, akar konflik tidak hanya terletak pada identitas etnis semata, melainkan terletak pada dinamika sosial budaya antara masyarakat Sambas dan komunitas Madura pendatang yang belum terakomodasi secara harmonis.

Hasil dari penelitian ini juga menitikberatkan pandangan dan pengalaman etnis Madura sebagai kelompok yang terdampak langsung konflik tersebut. Namun, peneliti juga menggunakan pandangan dari etnis lainnya yang ada di Sambas, seperti etnis Melayu. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa masyarakat Madura telah diimbau untuk mengungsi sebelum pecahnya konflik di Kota Sambas. Kekerasan yang dipicu oleh massa dari luar Kota Sambas, menjadikan hubungan harmonis masyarakat justru menjadi ironi.

Temuan penting dalam kajian ini menunjukkan bahwa tenggelam dalam persepsi akan rasa damai bisa menciptakan kelengahan sementara. Baik di masyarakat sipil maupun aparat. Sehingga, tidak ada mitigasi terhadap potensi

meluasnya konflik di wilayah sekitar. Ketika kekerasan pecah, pengungsian dilakukan secara darurat tanpa kesiapan logistik dan perlindungan yang memadai, menyebabkan penderitaan lanjutan terutama bagi kelompok yang rentan seperti lansia, perempuan, dan anak-anak. Sebagai upaya bertahan hidup di tempat baru, masyarakat Madura secara terpaksa melakukan jual beli harta benda, kehilangan tanah, dan akses terhadap tempat asal yang membentuk kemiskinan struktural. Peneliti juga menemukan adanya unsur simbolik kekerasan yang menyerupai praktik mengayau, yang di mana simbol ini telah diinstitutionalisasi secara politis dan militeristik sejak masa penumpasan PGRS/Paraku. Akibat dari konflik ini menyebabkan retaknya hubungan antaretnis dan trauma kolektif yang berlapis dalam masyarakat pasca-konflik komunal.

Hasil penelitian menunjukkan adanya implikasi terhadap bidang akademik dan sosial. Secara akademis, penelitian ini dapat membantu melengkapi historiografi Indonesia yang berfokus ke pendalaman sejarah lokal Kalimantan Barat, meskipun telah banyak penelitian yang mengangkat tentang Kerusakan Sambas Tahun 1999 secara general, namun penelitian yang mengkhususkan di satu wilayah belum terlalu banyak, seperti contohnya dampak kerusakan di Kecamatan Tebas. Sehingga dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi bagian untuk melengkapi gambaran keadaan tiap daerah pada saat kerusakan terjadi. Secara sosial, penelitian ini merangkum memori kolektif mereka yang terdampak. Hal yang dialami seperti relokasi, kehilangan harta kepemilikan, dan retaknya hubungan sosial menjadi dasar agar upaya resolusi konflik dapat dilakukan dengan cekatan dan lebih baik lagi.

Disarankan terhadap penelitian lanjutan agar dapat melakukan perbandingan studi kasus konflik yang ada di Sambas dengan konflik serupa dengan daerah lain di Indonesia. Tujuan perbandingan tersebut untuk mengidentifikasi pola dan penanganan konflik, peran pemerintah, aparat, dan sipil, serta seberapa besar pengaruhnya dalam masyarakat. Kemudian, diharapkan agar penelitian berikutnya juga melibatkan tokoh masyarakat, birokrat daerah, organisasi masyarakat, serta akademisi yang berkecimpung dalam studi sosial sebagai informan agar menghasilkan lebih banyak sudut pandang baru dan penelitian yang bisa bersifat lebih objektif.

Daftar Pustaka

- AbdulMagied, S. A. (2002). Othering, Identity, and Recognition: The Social Exclusion of the Constructed "Other." *Future Journal of Social Science*, 1(1), 111–128. <https://doi.org/10.54623/fue.fjss.1.1.5>
- Alfarizzi, D. Y., Nabila, S. T., Shinta, C., & Maharani, Z. (2025). *Kabupaten Sambas dalam Angka 2025*. BPS Kabupaten Sambas.
- Alqadrie, S. I. (1999). Konflik Etnis di Ambon dan Sambas: Suatu Tinjauan Sosiologis. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 58, 36–57. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20452316>
- Aminullah, Lestari, P., & Tripambudi, S. (2015). Model Komunikasi Antarbudaya Etnik Madura dan Etnik Melayu. *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*, 2(4), 272–281. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i4.77>
- Arkanudin. (2006). Menelusuri Akar Konflik Antaretnik di Kalimantan Barat. *MediaTor (Jurnal Komunikasi)*, 7(2), 185–194. <https://doi.org/10.29313/mediator.v7i2.1276>
- Arpan. (1995). *Catatan Peninggalan Sejarah di Sambas*. Penilik Kebudayaan Kecamatan Sambas. (Tidak Diterbitkan).

- Bestari, B., Zakso, A., & Firmansyah, H. (2022). Peristiwa dan Latar Belakang Kerusakan antar Suku Madura-Melayu di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas pada Tahun 1999. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 11(2), 1–8. <https://doi.org/10.26418/jppk.v11i2.52301>
- Darmaji, A., Nurdin, M. A., & Razak, M. H. bin A. (2024). Genealogi Konflik Etnis Dayak dan Madura di Kalimantan Barat. *Jurnal Refleksi*, 23(2), 347–370. <https://doi.org/10.15408/ref.v23i2.42155>
- Fuadi, A. (2020). *Keragaman dalam Dinamika Sosial Budaya Kompetensi Sosial Kultural Perikat Bangsa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gottschalk, L. R. (1969). *Understanding History: A Primer of Historical Method* (Second Ed). New York: Alfred A. Knopf.
- Humaidy, M. A. (2012). Analisis Stratifikasi Sosial sebagai Sumber Konflik antar Etnik di Kalimantan Barat. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 12(2), 186–195. <https://doi.org/10.19105/karsa.v12i2.142>
- Husaini. (2015). Etos Kerja Orang Madura di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Sociologique, Jurnal Mahasiswa S-1 Sosiologi Fisip Untan*, 3(4), 1–19. <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/sociologique/article/view/877/0>
- Jonge, H. de, & Nooteboom, G. (2006). Why the Madurese? Ethnic Conflicts in West and East Kalimantan Compared. *Asian Journal of Social Science*, 34(3), 456–474. <http://www.jstor.org/stable/23654485>
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah* (Edisi Baru). Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Nova, A., Chalimi, I. R., & Mirzachaerulsyah, E. (2023). Dampak Tragedi Ketupat Berdarah Bagi Masyarakat di Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Pada Tahun 1999-2004. *Candrasangkala: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 9(2), 38–45. <http://dx.doi.org/10.30870/candrasangkala.v9i2.22104>
- Panjaitan, M. (2003). Melawan Ketidakadilan untuk Menghapuskan Kemiskinan Struktural. *Sociae Polites*, 5(19). <https://files01.core.ac.uk/download/pdf/236428923.pdf>
- Pietra, J. (2016). *Trauma Kolektif yang Tidak Pernah (di) Pulih(kan)*. https://www.researchgate.net/publication/333041272_Trauma_Kolektif_yang_Tidak_Pernah_di_Pulihkan
- Purwana, B. H. S. (2000). *Kerusuhan Sambas Tahun 1999*. Pontianak: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Purwana, B. H. S. (2002). *Kerusuhan Sosial di Sambas: Eksplorasi Akar Permasalahan dan Kebijakan Penyelesaiannya*. Pontianak: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Purwana, B. H. S., Hasanuddin, Sulistyorini, P., & Asanini. (2004). *Sejarah Pemerintahan Kota Pontianak dari masa ke masa*. Pemerintah Kota Pontianak.
- Rahmayani, A., & Mirawati, I. (2015). *Aktivitas Perdagangan di Pelabuhan Sambas 1833- 1930*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Shinta, C. (2024). *Kecamatan Sambas dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Suprpto, B., Subekti, A., & Alfahmi, M. N. (2019). *Dari Singkawang Merayakan Kebinekaan*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Kalimantan Selatan.
- Suprpto, W. (2018). Relokasi Masyarakat Madura di Singkawang sebagai Bagian dari Proses Resolusi Pasca Konflik Etnisitas di Kabupaten Sambas. *Jurnal*

- Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*, 3(2), 33–40.
<https://dx.doi.org/10.26737/jpipsi.v3i2.975>
- Susan, R. (n.d.). *Head-Hunting in Southeast Asia*.
<https://seasite.niu.edu/crossroads/russell/headhunting.htm>
- Tanasaldy, T. (2012). Ethnic Conflict and Politics. In *Regime Change and Ethnic Politics in Indonesia: Dayak Politics of West Kalimantan* (hal. 209–255). Brill.
<https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctvbnm4q8.10>
- Touwe, S., & Sopacua, J. (2023). Jejak VOC dan Pembentukan Administratif Pemerintahan Hindia Belanda di Pontianak Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 1552–1561.
<https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25171>
- Ubaedillah, A. (2022). When Ethnicity Is Stronger Than Religion: A Look into Dayak and Madurese Conflicts in Kalimantan, Indonesia. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, 21(2), 285–304. <https://doi.org/10.15408/ref.v21i2.34795>
- Utama, E. J. P. (2017). Konflik Etnis Sambas Tahun 1999 Arah Disintegrasi Bangsa. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 3(1), 1–10.
<http://dx.doi.org/10.31851/kalpataru.v3i1.1605>
- Utomo, S. (2018). The Role of Local Government, Religious and Community Figures, in Conjunction with the Security Forces (Polri) in Returning a Harmonic Life Post Conflict as Ethnic in Sambas Regency. *International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS)*, 1(2), 121–128. <http://dx.doi.org/10.26737/ij-mds.v1i2.429>
- Veth, P. J. (2017). *Borneo Bagian Barat: Geografis, Statistis, Historis: Jilid I*. (P. Yeri. OFM. Cap., Trans.). Pontianak: Institut Dayakologi.
- Yogaswara, H. (2012). *Meneruskan Hidup Setelah Kerusuhan: Ingatan Kolektif dan Identitas Etnis Madura Pasca Kekerasan Antar Etnis di Kota Sampit, Kalimantan Tengah*. (Disertasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia). Universitas Indonesia.